

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG**

**RENCANA KERJA  
PERUBAHAN  
TAHUN 2023**



**SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KABUPATEN  
BULELENG**



## **Kata Pengantar**

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja Perubahan SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Buleleng Tahun 2023.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA PERUBAHAN tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja Perubahan ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Singaraja, 5 September 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KABUPATEN BULELENG,**



**I Gede Arya Suardana, AP.MM**  
**Pembina Tk. I (IV/b)**  
**NIP. 19740323 199311 1 001**



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI  
 BULELENG NOMOR  
 100.3.3.2/437/HK  
 TAHUN 2023 TENTANG  
 PENETAPAN  
 PERUBAHAN RENCANA  
 KERJA PERANGKAT  
 DAERAH KABUPATEN  
 BULELENG TAHUN  
 2023

**DAFTAR ISI**

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II : EVALUASI RENJA PERUBAHAN SAMPAI DENGAN          TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....</b>	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah.....	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan SatPolPP.....	32
<b>BAB III : RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN          PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>45</b>



**DAFTAR TABEL**

**Hal**

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023.....	11
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan SatPolPP.....	15
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	22
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023.....	33
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024.....	35

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Hal tersebut disusun dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan.

Sementara berkaitan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 7 menyatakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (PD) wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perubahan PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis PD dan mengacu kepada RKPD Perubahan. Sedangkan RKPD Perubahan dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan, Kebijakan Umum Anggaran (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang mana penyusunannya memperhatikan kewenangan lembaga dan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan

melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang agar tercipta keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perubahan PD.

Sesuai amanat tersebut di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (SatPolPP) Kabupaten Buleleng tahun 2023. Renja Satpol PP Kabupaten Buleleng merupakan dokumen rencana pembangunan PD berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SatPolPP Kabupaten Buleleng, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja SatPolPP Kabupaten Buleleng tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026, yaitu : *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Buleleng Yang Tenram, Aman, Tertib dan Taat Hukum ”*

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja, misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026 adalah "Meningkatkan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Menumbuhkan rasa Kepatuhan Hukum di Masyarakat" yang dirinci sebagai berikut :

1. Menegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Buleleng;
2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Buleleng;
3. Mewujudkan Perlindungan Masyarakat;
4. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur SatPolPP yang professional. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

### **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023 adalah:

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



Pembangunan Daerah;

- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- 16 Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 008/M>PPN/01/2007/050/264A/SJ Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Musrenbang;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 4);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 4);
- 19 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tugas pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud**

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi dan kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan antar bidang secara efektif dan efisien, terciptanya harmonisasi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 tahun kedepan dan terciptanya koordinasi antar bagian yang ada serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.

#### **Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 adalah:

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan antar fungsi di lembaga SatPolPP Kabupaten Buleleng;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif yang berkelanjutan.

**1.4 Sistematika Penulisan**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

**BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  
TAHUN BERKENAAN**

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH**

Berisi tentang Faktor-faktor Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan, serta Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

**BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng pada Tahun 2021 secara keseluruhan pelaksanaan Renja mencapai 98,77%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja program dan kegiatan berjalan optimal dengan tingkat deviasi sebesar 1,23%. Sedangkan pelaksanaan Renja pada Tahun 2022 sampai dengan sebesar 98,30% dan kemungkinan masih dapat meningkatkan lagi karena waktu yang tersedia cukup lama dan penyerapan anggaran melalui pengadaan barang/jasa relative masih besar, sehingga sangat optimis pada akhir tahun 2023 dapat tercapai pelaksanaan Renja minimal sebesar 99,50%.

Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Buleleng selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

**A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

**B. Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Program Triwulan II Tahun 2023

Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng pada Tahun 2023 sebesar Rp.14.257.356.964,00 (*Empat Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), Belanja Operasi Dan Belanja Modal, Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai Rp.8.626.920.590,00 dan Belanja Barang Dan Jasa Rp.5.251.590.155,00 sedangkan Belanja Modal Rp.378.846.219,00 Realisasi sebesar Rp.6.088.312.031,00 (*Enam Milyar Delapan Puluh*

*Delapan Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah)* atau sekitar 42.70% terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp.4.227.345.328,00 atau sekitar 49.00%, Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp.1.860.966.703,00 atau sekitar 35.43% serta Belanja Modal Rp.- atau sekitar 0% yang dijabarkan melalui 2 Program, Kegiatan 10 dan 31 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

## RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Tabel T-C.29  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja  
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat  
Daerah s.d Tahun 2023  
Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-1) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar												
1	05	Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pmerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	52	100	100	100	252	2.5	
1.05.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersedian Dokumen Anggaran, Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Baik Dan Akuntabel	100	Persen	58	100	100	100	100	258	2.6	
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	2	5	5	100	3	10	3.3
		06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	6	12	12	100	12	30	2.5
1.05.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pelaksanaan Layanan Administrasi Keuanganyang Sesuai Dengan Ketentuan	100	Persen	66	100	100	100	100	266	2.7	
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66	Orang	66	66	66	100	66	198	3
		02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	12	12	100	-	12	0
		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen Kepegawaian	6	12	12	100	12	30	2.5
		05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	12	Laporan	6	12	12	100	12	30	2.5
1.05.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pelaksanaan Pendataan dan Pengelolaan Kepegawaian Yang Baik	100	Persen	25	100	100	100	100	225	2.3	
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2	Paket	-	198	198	100	2	200	100
		03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	6	-	-	-	12	18	1.5

## RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

1.05.01.2.06.			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pelayanan Administrasi Umum Dan Perkantoran Yang Baik Dan Sesuai Standar</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>33</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>233</b>	<b>2.3</b>
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1	Paket	-	1	1	100	1	2	2
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	5	5	100	-	5	0
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	4	Paket	2	5	5	100	4	11	2.8
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan Dan Minuman	-	-	-	2	2	100	-	2	0
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	6	12	12	100	12	30	2.5
1.05.01.2.07.			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kegiatan Yang Berkualitas Baik</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
		05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1	Paket	-	2	2	100	1	3	3
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	7	Unit	-	2	2	100	7	9	1.3
1.05.01.2.08.			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>2.5</b>
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	6	12	12	100	12	30	2.5
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12	Laporan	6	12	12	100	12	30	2.5
		03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12	Laporan	6	12	12	100	12	30	2.5
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12	Laporan	6	12	12	100	12	30	2.5
1.05.01.2.09.			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dengan Baik</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>235</b>	<b>2.3</b>
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	25	Unit	12	54	54	100	25	91	3.6
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	56	Unit	24	54	54	100	56	134	2.4
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	57	Unit	15	-	-	-	57	72	1.3
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	1	-	-	-	4	5	1.2
1	05	02	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)</b>	<b>95</b>	<b>Persen</b>	<b>52</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>387</b>	<b>4</b>
1.05.02.01.			<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Ketertiban, Ketentraman Dan Keindahan Di Masyarakat</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>56</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>256</b>	<b>2.7</b>



## RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

			01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dicegah Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan	24	Kasus	12	12	12	100	24	48	2
			02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Masa Yang Dilakukan Penindakan	24	Kasus	12	12	12	100	24	48	2
			03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12	Dokumen	6	12	12	100	12	30	2.5
			04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban Umum	12	Dokumen	6	12	12	100	12	30	2.5
			05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	279	Orang	155	31	31	100	279	465	1.7
			06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12	Dokumen	6	12	12	100	12	30	2.5
			08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Yang Telah Dibuat Dan Dimutakhirkan	1	Dokumen	1	-	-	-	1	2	2
			09	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	12	12	100	-	12	0
			09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda Dan Perkada Yang Terlayani	12	Laporan	6	12	12	100	12	30	2.5
<b>1.05.02.2.02.</b>				<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada Yang Sesuai Dengan Ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>50</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>162</b>	<b>1.6</b>
			01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12	Laporan	6	12	12	100	12	30	2.5
			02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12	Laporan	6	12	12	100	12	30	2.5
			03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur Yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12	Laporan	6	12	12	100	12	30	2.5
<b>1.05.02.2.03.</b>				<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota Yang Kompeten</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>2.5</b>
			01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	12	Laporan	6	12	12	100	12	30	2.5

Singaraja 5 September 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG.


  
**I Gede Arva Suardana, AP.MM**  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 197403231993111001

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Dibentuk melalui Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja, Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, meliputi ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan masyarakat dan aparatur serta perlindungan masyarakat, yang menjadi kewenangan Kabupaten, melaksanakan tugas dekonsentrasi sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja; dan penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Tabel T-C 30  
Pencapaian Kinerja  
Pelayanan Satpol PP  
Kabupaten Buleleng**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	100%	100%	100%	50 %	100%	

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SatPolPP**

Sejak dibentuk pada tahun 1950 dengan terbitnya Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh seorang Sekretaris , 3 Kasubag, 4 Kepala Bidang dan 8 Kepala Seksi.

Aspek strategis Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 1 (satu) huruf e, disebutkan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan dan menjadi tugas dari Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng sebagai kepanjangan tangan dari Kepala Daerah untuk membantu dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Suasana tentram dan tertib menjadi modal dasar baik dalam menjalankan roda pemerintahan maupun roda perekonomian, roda pemerintahan dan roda perekonomian tidak akan berjalan dengan optimal apabila kondisi ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat tidak terselenggara dengan baik oleh sebab itu, ketiga aspek pelayanan dasar tersebut menjadi aspek strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga pemerintah berkewajiban

mendukung penguatan kelembagaan dan penganggaran guna menunjang pelaksanaan cipta kondisi tibumtranmas serta perlindungan masyarakat yang kondusif dan berjalan secara optimal.

Isu strategis berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng yaitu Masalah meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi dan demokratisasi yang penuh keterbukaan, menurunnya wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara, masalah masih adanya perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan masyarakat menjadi isu strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kabupaten Buleleng Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng beserta Satlinmas bertugas untuk melaksanakan pengamanan dan senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait itu dilaksanakan guna menciptakan rasa tentram, tertib dan merasa terlindunginya masyarakat dalam beraktifitas.

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang secara Rasio membutuhkan personil sebanyak 490 orang anggota dibandingkan dengan kondisi saat ini yang baru

memiliki anggota sebanyak 190 orang.

2. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;
3. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
5. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Pemasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat berdampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Perubahan paradigma penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (kesiagaan), untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah.

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Buleleng

1. Aspek regulasi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Satpol PP tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2010;

2. Aspek kebutuhan personil perlu melakukan upaya pendayagunaan aparatur, mengingat, dimana setiap kecamatan harus dibentuk Unit Satpol PP Kecamatan yang secara ex – officio dijabat oleh Kasi Trantib Kecamatan dan untuk anggota Satpol PP Kecamatan dengan mendayagunakan personil Kecamatan atau diisi oleh anggota Linmas Periode Siap, masing-masing kecamatan 5 orang anggota linmas yang telah terlatih, dengan catatan apabila itu dilaksanakan anggota SatPolPP Kecamatan. Disamping itu untuk penegakan Perda maupun penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan memberdayakan anggota yang ada dengan catatan untuk penyelenggaraan keamanan kantor dan menjaga rumah dinas pimpinan direkrut dari anggota Linmas periode siap sebanyak 40 orang yang konsekuensinya akan menambah anggaran;
3. Aspek Sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan patroli sesuai dengan SPM, bahwa Satpol PP melaksanakan patroli 3 (tiga) kali dalam sehari;
4. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Buleleng Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan RENSTRA Kabupaten Buleleng. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng belum menjadi kebijakan Utama Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Buleleng untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng, Satuan Polisi Pamong Praja yang masih baru terbentuk berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2008 membutuhkan personil, sarana prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiayai program maupun kegiatan. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang siap siaga dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun oleh instansi tingkat Provinsi maupun pusat.



Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng berdasarkan tugas pokok dan fungsinya pada awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengacu kepada 1 Program Utama dan 3 Kegiatan serta 1 Program Pendukung serta 7 Kegiatan Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.31.

**RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Tabel T-C31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun  
2023  
Kabupaten Buleleng

Nama Perangkat Daerah : Satpol PP Kabupaten Buleleng

Lembar : .....

dari : .....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuha n Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pmerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>10.261.508.188</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pmerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>10.261.508.188</b>	
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Anggaran, Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Baik Dan Akuntabel</b>	<b>100%</b>	<b>49.212.960</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Anggaran, Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Baik Dan Akuntabel</b>	<b>100%</b>	<b>49.212.960</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	39.462.960	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	39.462.960	
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan	12 Laporan	9.750.000	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan	12 Laporan	9.750.000	

**RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

	Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Layanan Administrasi Keuangan Yang Sesuai Dengan Ketentuan</b>	100%	8.267.966.340	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Layanan Administrasi Keuangan Yang Sesuai Dengan Ketentuan</b>	100%	8.267.966.340	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Buleleng	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang	8.130.829.400	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Buleleng	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang	8.130.829.400	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	85.540.180	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	85.540.180	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	12 Laporan	51.596.760	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	12 Laporan	51.596.760	
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Pendataan Dan Pengelolaan Kepegawaian</b>	100%	244.488.880	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Pendataan Dan Pengelolaan Kepegawaian</b>	100%	244.488.880	

**RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

			<b>Yang Baik</b>					<b>Yang Baik</b>			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	158.200.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	158.200.000	
	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	86.288.880	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	86.288.880	
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Tingkat Pelayanan Administrasi Umum Dan Perkantoran Yang Baik Dan Sesuai Standar</b>	<b>100%</b>	<b>310.690.773</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Tingkat Pelayanan Administrasi Umum Dan Perkantoran Yang Baik Dan Sesuai Standar</b>	<b>100%</b>	<b>310.690.773</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	4.083.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	4.083.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Sediakan	10 Paket	268.550.107	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Sediakan	10 Paket	268.550.107	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	38.057.666	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	38.057.666	

**RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Operasional Kegiatan Yang Berkualitas Baik</b>	100%	131.868.000	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Operasional Kegiatan Yang Berkualitas Baik</b>	100%	131.868.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 Paket	39.849.000	Pengadaan Mebel	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 Paket	39.849.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Buleleng	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	7 Unit	92.019.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Buleleng	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	7 Unit	92.019.000	
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	612.911.175	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	612.911.175	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	59.630.179	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	59.630.179	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	75.300.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	75.300.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	252.075.000	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	252.075.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	225.905.996	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	225.905.996	

**RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

			Kantor Yang Disediakan					Umum Kantor Yang Disediakan			
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Operasional Kegiatan Yang Berkualitas Baik</b>	<b>100%</b>	<b>644.370.060</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Operasional Kegiatan Yang Berkualitas Baik</b>	<b>100%</b>	<b>644.370.060</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Buleleng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	334.560.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Buleleng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	334.560.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Buleleng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	56 Unit	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Buleleng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	56 Unit	15.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kab. Buleleng	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	57 Unit	30.524.138	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kab. Buleleng	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	57 Unit	30.524.138	

**RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kab. Buleleng	Jumlah Gedung/Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	264.285.922	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kab. Buleleng	Jumlah Gedung/Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	264.285.922	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketertarikan, Keindahan)</b>	100%	3.516.522.655	<b>Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketertarikan, Keindahan)</b>	100%	3.516.522.655	
2.1	<b>Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Ketertiban, Ketertarikan Dan Keindahan Di Masyarakat</b>	100%	3.021.001.275	<b>Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Ketertiban, Ketertarikan Dan Keindahan Di Masyarakat</b>	100%	3.021.001.275	
	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kab. Buleleng	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	24 Kasus	830.914.720	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kab. Buleleng	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	24 Kasus	830.914.720	

**RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Buleleng	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Yang Dilakukan Penindakan	24 Kasus	1.146.380.920	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Buleleng	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Yang Dilakukan Penindakan	24 Kasus	1.146.380.920	
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	40.658.800	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	40.658.800	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman	12 Dokumen	73.651.840	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman	12 Dokumen	73.651.840	



**RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Umum		dan Ketertiban Umum			Umum		dan Ketertiban Umum			
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Buleleng	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	279 Orang	91.362.868	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Buleleng	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	279 Orang	91.362.868	
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab.Buleleng	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	671.664.107	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	671.664.107	
Penyusunan SOP Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Kab.Buleleng	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Yang Telah Dibuat Dan Dimuktahirkan	1 Dokumen	118.228.600	Penyusunan SOP Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Yang Telah Dibuat Dan Dimuktahirkan	1 Dokumen	118.228.600	
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan	Kab.Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda	12 Laporan	48.139.420	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda	12 Laporan	48.139.420	

**RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

	Peraturan Daerah dan Perkada		Dan Perkada Yang Terlayani			Peraturan Daerah dan Perkada		Dan Perkada Yang Terlayani			
<b>2.2</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada Yang Sesuai Dengan Ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>417.744.540</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>100%</b>	<b>417.744.540</b>	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 Laporan	140.393.280	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 Laporan	140.393.280	0
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	65.563.300	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	65.563.300	

**RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	211.787.960	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	211.787.960	
<b>2.3</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota Yang Kompeten</b>	<b>100%</b>	<b>77.776.840</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota Yang Kompeten</b>	<b>100%</b>	<b>77.776.840</b>	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Dalam Mendukung Pelaksanaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	12 Laporan	77.776.840	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Dalam Mendukung Pelaksanaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	12 Laporan	77.776.840	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan masyarakat sepenuhnya diusulkan dari bidang teknis dan Sekretariat dilingkungan Satpol PP Kabupaten Buleleng melalui pelaksanaan kegiatan Forum OPD SatPolPP Se Kabupaten Buleleng yang kemudian diinput ke dalam aplikasi SIPPEDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usulan-usulan program kegiatan tersebut selanjutnya di evaluasi berdasarkan isu-isu strategis yang terdapat dalam masyarakat dengan disinkronkan sesuai tugas dan fungsi SatPolPP Kabupaten Buleleng.

Selanjutnya seluruh usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dibahas bersama unsur terkait yang membidangi dan Tim Anggaran untuk menyelaraskan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ada.

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut :

Tabel T-C32  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku  
Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Buleleng

Nama Perangkat Daerah : Satpol PP Kabupaten Buleleng

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>				
1	Bantuan Kendaraan Truk Operasional Satpol PP Kab./Kota	SatPolPP Kab. Buleleng	Jumlah Sarana Prasarana Truk Operasional Satuan Polisi Pamong Praja	1 (satu) unit Truk	
2	Bantuan alat dan Pakaian Anti Huru-Hara	SatPolPP Kab. Buleleng	Jumlah Alat dan Pakaian Anti Huru Hara Satuan Polisi Pamong Praja	Untuk 1 Pleton (31)	

**BAB III**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT**

**DAERAH**

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Buleleng, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kabupaten Buleleng adalah sebagai OPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang – undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Buleleng.

Program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023 terdiri atas 1 (Satu) program Utama dengan 3 (Tiga) Kegiatan dan 1 (Satu) Program Pendukung dengan 7 (Tujuh) Kegiatan Pendukung dengan jumlah pagu indikatif sebesar 13.778.030.843,-. Rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C.33.

Tabel T-C33  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Buleleng

Nama Perangkat Daerah : SatPolPP Kabupaten Buleleng

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>100%</b>	<b>10.261.508.188</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>10.115.885.596</b>
1 05 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Anggaran, Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Baik Dan Akuntabel</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>100%</b>	<b>49.212.960</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>49.146.339</b>

## RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Buleleng	3 Dokumen	39.462.960	DAU		23 Dokumen	39.396.339
1	05	01	2.01	06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Buleleng	12 Laporan	9.750.000	DAU		56 Laporan	9.750.000
1	05	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Layanan Administrasi Keuangan Yang Sesuai Dengan Ketentuan</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>100%</b>	<b>8.267.966.340</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>8.628.250.290</b>
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Buleleng	66 Orang	8.130.829.400	DAU		57 Orang	6.491.146.591
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Buleleng	12 Dokumen	85.540.180	DAU		12 Dokumen	85.540.180
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi	Kab. Buleleng	12 Laporan	51.596.760	DAU		1 Laporan	51.563.519



**RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

						Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun							
1	05	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Pendataan Dan Pengelolaan Kepegawaian Yang Baik</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>100%</b>	<b>244.488.880</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>209.939.017</b>
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Buleleng	2 Paket	158.200.000	DAU		1 Paket	123.900.000
1	05	01	2.05	03	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Buleleng	12 Dokumen	86.288.880	DAU		12 Dokumen	86.039.017
1	05	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pelayanan Administrasi Umum Dan Perkantoran Yang Baik Dan Sesuai Standar</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>100%</b>	<b>310.690.773</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>233.393.241</b>
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Kab. Buleleng	1 Paket	4.083.000	DAU		1 Paket	5.469.900
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Sediakan	Kab. Buleleng	10 Paket	268.550.107	DAU		3 Paket	197.972.341

**RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Buleleng	12 Laporan	38.057.666	DAU		12 Laporan	29.951.000
1	05	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Operasional Kegiatan Yang Berkualitas Baik</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>100%</b>	<b>131.868.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>38.850.000</b>
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Kab. Buleleng	1 Paket	39.849.000	DAU		10 Unit	38.850.000
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Kab. Buleleng	7 Unit	92.019.000	DAU		-	-
1	05	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>100%</b>	<b>612.911.175</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>621.970.459</b>
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Buleleng	12 Laporan	59.630.179	DAU		12 Laporan	59.630.179
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Kab. Buleleng	12 Laporan	75.300.000	DAU		12 Laporan	76.100.000

**RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kab. Buleleng	12 Laporan	252.075.000	DAU		12 Laporan	235.875.000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Kab. Buleleng	12 Laporan	225.905.996	DAU		12 Laporan	250.365.280
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Operasional Kegiatan Yang Berkualitas Baik</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>100%</b>	<b>644.370.060</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>334.336.250</b>
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Buleleng	25 Unit	334.560.000	DAU		54 Unit	271.260.000
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	Kab. Buleleng	56 Unit	15.000.000	DAU		54 Unit	15.000.000

### RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Kab. Buleleng	57 Unit	30.524.138	DAU		5 Unit	48.076.250
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Buleleng	4 Unit	264.285.922	DAU		-	-
1	05	02			<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>100%</b>	<b>3.516.522.655</b>	<b>DAU</b>		<b>95%</b>	<b>3.426.011.281</b>
1	05	02	2.01		<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Ketertiban, Ketentraman Dan Keindahan Di Masyarakat</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>100%</b>	<b>3.021.001.275</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>2.961.767.963</b>
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	Kab. Buleleng	24 Kasus	830.914.720	DAU		12 Laporan	839.582.721

**RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

					Pengawasan	Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan							
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Yang Dilakukan Penindakan	Kab. Buleleng	24 Kasus	1.146.380.920	DAU		12 Laporan	1.058.899.081
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng	12 Dokumen	40.658.800	DAU		12 Dokumen	40.658.800

**RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Yang Memuat Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Buleleng	12 Dokumen	73.651.840	DAU		12 Dokumen	73.651.840
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Buleleng	279 Orang	91.362.868	DAU		279 Orang	91.362.868
1	05	02	2.01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab. Buleleng	12 Dokumen	671.664.107	DAU		12 Dokumen	691.238.133
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Yang Telah Dibuat Dan Dimuktahirkan	Kab. Buleleng	1 Dokumen	118.228.600	DAU		5 Dokumen	120.148.600

**RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda Dan Perkada Yang Terlayani	Kab. Buleleng	12 Laporan	48.139.420	DAU		12 Laporan	46.225.920
1	05	02	2.02		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada Yang Sesuai Dengan Ketentuan</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>100%</b>	<b>417.744.540</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>386.466.478</b>
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Kab. Buleleng	12 Laporan	140.393.280	DAU		12 Laporan	108.262.018
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kab. Buleleng	12 Laporan	65.563.300	DAU		12 Laporan	68.916.500

**RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

						Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kab. Buleleng	12 Laporan	211.787.960	DAU		12 Laporan	209.287.960
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota Yang Kompeten</b>	<b>Kab. Buleleng</b>	<b>100%</b>	<b>77.776.840</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>77.776.840</b>
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Dalam Mendukung Pelaksanaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Kab. Buleleng	12 Laporan	77.776.840	DAU		12 Laporan	255.000.000



**BAB IV**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan peningkatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan rasa kepatuhan hukum sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana.

Output Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng adalah Program Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, Renja Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Renja Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng selama kurun waktu satu tahun. Rencana kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja, Disamping sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Kabupaten Buleleng juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023. Adapun fungsi dari Renja tahun 2023 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2023 bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng kami susun secara Objektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

**Singaraja, 5 September 2023**

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Buleleng**



**I Gede Arya Suardana, AP.MM**  
**Pembina Tk. I (IV/b)**  
**Nip. 19740323 199311 1 011**